JKP
Jurnal Kajian Pariwisata

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67

e-ISSN: 2686-2522

MODEL PEMBIAYAAN RESERTIFIKASI DESA WISATA BERKELANJUTAN: STUDI KASUS DESA WISATA PENTINGSARI

Hendy Arditya Syaifullah[1], Amelda Pramezwary[2], Juliana Juliana[3], Diena M. Lemy[4]

[1]Universitas Pelita Harapan, 01645250031@student.uph.edu
[2]Universitas Pelita Harapan, amelda.pramezwary@uph.edu
[3]Universitas Pelita Harapan, juliana.stpph@uph.edu
[4]Universitas Pelita Harapan, diena.lemy@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Sep, 2026
Revised Sep, 2026
Accepted Sep, 2026

Kata Kunci:

Resertifikasi;
Pembiayaan CSR;
Pentingsari;
Pariwisata Berkelanjutan;
Kolaborasi Stakeholder.

Keywords:

Recertification;
CSR Financing;
Pentingsari;
Sustainable Tourism;
Stakeholder Collaboration.

ABSTRAK

Sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia menghadapi tantangan dalam keberlanjutan pembiayaan resertifikasi, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang membatasi dukungan APBN/APBD. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pembiayaan resertifikasi Desa Wisata Pentingsari serta mekanisme kolaborasi yang mendukung keberlanjutan sertifikasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan kunci yang mewakili pengelola desa wisata, pemerintah, mitra CSR, lembaga sertifikasi, dan masyarakat, serta didukung dokumen kerja sama dan sertifikasi. Data dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan resertifikasi menerapkan skema *cost-sharing* antara Bakti BCA dan Desa Wisata Pentingsari dengan pembagian komponen biaya sesuai peran masing-masing pihak. Skema tersebut didukung penugasan kelembagaan, pemenuhan bukti dukung, serta monitoring dan administrasi digital. Temuan menunjukkan bahwa kemitraan CSR melalui *cost-sharing* dapat menjadi alternatif pembiayaan ketika dukungan anggaran publik terbatas, dengan keberlanjutannya dipengaruhi kekuatan kelembagaan dan konsistensi pengelola.

ABSTRACT

Sustainable tourism destination certification in Indonesia faces challenges in sustaining recertification financing, particularly amid government budget efficiency policies that limit APBN/APBD support. This study aims to analyze the recertification financing model of Pentingsari Tourism Village and the collaborative mechanisms supporting certification continuity. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews with five key informants representing the tourism village management, government, CSR partner, certification body, and community, supported by cooperation and

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151 e-ISSN: 2686-2522
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67

certification documents. Data were analyzed thematically. The findings show that recertification financing applies a cost-sharing scheme between Bakti BCA and Pentingsari Tourism Village, with cost components allocated according to each party's role. The scheme is supported by institutional assignment, fulfillment of supporting evidence, and digital monitoring and administration. The findings indicate that CSR partnerships through cost-sharing can provide an alternative financing mechanism when public budget support is limited, while its continuity depends on institutional strength and management consistency.

Penulis Korespondensi:
Hendy Arditya Syaifullah,
Program studi Magister Pariwisata
Universitas Pelita Harapan
Jl. Mh Thamrin Bulevard 1100 Lippo Village Tangerang, Kelapa Dua, Klp. Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
Email: 01645250031@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Perkembangan standar sertifikasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum tahun 2021, proses sertifikasi desa wisata masih mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016. Namun, melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021, pedoman tersebut dimutakhirkan secara substansial dengan mengadopsi kerangka *Global Sustainable Tourism Council-Destination* (GSTC-D) versi 2.0 yang mengintegrasikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam 174 indikator pada empat kriteria utama: tata kelola, sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan (Jaelani & Hanim, 2021; Lemy et al., 2022). Pembaruan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas dan kredibilitas destinasi melalui nilai strategis label keberlanjutan (Dias et al., 2024), tetapi juga memitigasi praktik *greenwashing* di mana klaim keberlanjutan sering kali disalahgunakan demi keuntungan citra semata (Elhoushy et al., 2025). Sertifikasi berbasis GSTC ini sejatinya dirancang untuk memperkuat posisi dan pelibatan masyarakat lokal dalam tata kelola destinasi (Buffa et al., 2025), yang pada tingkat tapak umumnya diawali melalui berbprogram pelatihan dan penyuluhan kesiapan sertifikasi (Habibie, 2021). Kendati demikian, adopsi standar baru ini berdampak pada meningkatnya kompleksitas penilaian, kebutuhan dokumentasi, serta lonjakan biaya operasional untuk sertifikasi dan resertifikasi. Kondisi tersebut menuntut desa wisata melakukan penyesuaian yang terstruktur demi mempertahankan status keberlanjutan mereka, meskipun secara regulasi kepatuhan terhadap standar ini bersifat sukarela (*voluntary*).

Sejarah sertifikasi desa wisata di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang secara keseluruhan mengalami kemajuan, tetapi prosesnya tidak mulus karena sering mengalami fluktuasi dan ketidakpastian. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, tercatat sebanyak 40 desa wisata yang tersertifikasi berkelanjutan, dengan rincian 16 desa pada 2020 dan 2021, serta masing-masing 4 desa pada 2022 dan 2024 (Jejaring Desa Wisata, 2025). Memasuki tahun 2025, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan program Bakti BCA dari PT Bank Central Asia dalam pelaksanaan program Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan melalui Lembaga Sertifikasi Produk Indonesia Sustainable Tourism Council (LS-Pr ISTC). Hasil kolaborasi ini mencatatkan tren krusial: 50% dari sepuluh desa wisata yang tersertifikasi merupakan kategori sertifikasi ulang (resertifikasi), yakni Desa Wisata Pentingsari, Bilibante, Kreatif Terong, Tamansari, dan Taro (Kementerian Pariwisata, 2025). Seluruh proses resertifikasi ini sepenuhnya didukung oleh skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bakti

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151 e-ISSN: 2686-2522
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67

BCA. Fenomena ini mengindikasikan pergeseran peran sektor swasta yang bertransformasi menjadi pilar utama resertifikasi desa wisata berkelanjutan di tingkat nasional.

Pengembangan desa wisata berkelanjutan pada hakikatnya merupakan konsep multidimensional yang membutuhkan dukungan finansial yang stabil dan berkelanjutan (Risfandini, 2024). Keterbatasan anggaran publik, yang semakin dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, dapat menjadi salah satu hambatan struktural (*financial barrier*) dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan dan keberlanjutan desa wisata. Dalam konteks tersebut, skema CSR menawarkan alternatif pembiayaan yang dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mendukung kebutuhan pengembangan desa wisata (Triwibiansyah & Bayangkara, 2025) . Kebutuhan terhadap alternatif pendanaan tersebut menjadi semakin relevan mengingat keterbatasan sumber daya keuangan masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan pariwisata di tingkat desa (Amanda & Agfianto, 2021).

Namun demikian, peran CSR dalam pengembangan desa wisata tidak lagi terbatas pada pemberian bantuan finansial semata. Pergeseran paradigma CSR menempatkan perusahaan sebagai mitra strategis yang terlibat dalam penciptaan nilai bersama (*creating shared value*/CSV). Melalui kemitraan tersebut, dukungan perusahaan dapat diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan potensi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan pengembangan pariwisata pedesaan yang mengoptimalkan potensi alam, sosial, dan budaya untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat (Pugra et al., 2021). Sinergi ini menjadi kian efektif ketika diwadahi dalam skema kolaborasi *Multi-Helix* maupun *Penta Helix* yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan secara terstruktur (Fitriana et al., 2025; Sumarna et al., 2025). Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta selanjutnya dapat memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan resiliensi destinasi melalui pendekatan *integrative governance* (Meliana et al., 2025; Teguh et al., 2025).

Dengan demikian, dukungan pembiayaan dalam pengembangan desa wisata tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ketersediaan dana, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme kolaborasi multipihak. Kolaborasi multipihak yang terstruktur dan inklusif, apabila diintegrasikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dapat memperkuat ketahanan aktivitas pariwisata pada destinasi berbasis komunitas (Octaviani et al., 2026). Model tata kelola berbasis komunitas dan kemitraan ini kerap menjadi rujukan sukses pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada kasus Desa Wisata Nglanggeran (Hendrayani et al., 2025).

Dalam lanskap tersebut, pemilihan Desa Wisata Pentingsari sebagai lokus penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan strategis. Pertama, Pentingsari merupakan desa wisata perintis yang memiliki rekam jejak panjang dalam praktik ekowisata berbasis masyarakat (Aji & Faniza, 2024) serta memiliki pengalaman lintas siklus, mulai dari sertifikasi awal hingga resertifikasi desa wisata berkelanjutan. Kedua, Pentingsari menampilkan fenomena unik dengan berhasil mempertahankan status sertifikasinya melalui skema pembiayaan non-pemerintah seperti CSR Bakti BCA di tengah ditiadakannya anggaran publik akibat kebijakan efisiensi. Ketiga, Pentingsari memiliki karakter kelembagaan yang matang dan stabil, ditunjukkan oleh kontinuitas kepemimpinan dan kemampuan adaptasi. Kondisi ini menjadikannya sebagai *critical case* di mana keberhasilan resertifikasi tidak hanya ditentukan oleh injeksi dana eksternal, tetapi juga oleh kapasitas tata kelola kelembagaan lokal.

Meskipun Pentingsari dikenal luas sebagai desa wisata mandiri berprestasi (Ihsan Mukhlisin & Trimarstuti, 2023; Jaelani & Hanim, 2021), bagaimana desa ini mentransformasi model tata kelolanya agar tetap patuh pada standar Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 tanpa ketergantungan pada APBN masih menjadi celah kajian yang belum banyak dieksplorasi. Situasi ini juga menggarisbawahi urgensi untuk mengkaji secara sistematis model pembiayaan resertifikasi yang melibatkan peran aktif CSR, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat desa (Mangin & Kriswibowo, 2022).

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151 e-ISSN: 2686-2522
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67

Kajian literatur saat ini masih terbatas pada penempatan CSR sebagai instrumen bantuan filantropis maupun sukarela, bukan sebagai mekanisme pembiayaan struktural dalam proses resertifikasi yang berbiaya tinggi. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis model pembiayaan resertifikasi desa wisata berbasis kolaborasi CSR sebagai bentuk *alternative governance mechanism*. Penelitian ini meletakkan CSR bukan sekadar sebagai sumber pendanaan substitusi, melainkan sebagai aktor strategis yang membentuk struktur tata kelola, mekanisme kontrol, dan keberlanjutan implementasi standar di tingkat destinasi lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penyelidikan di mana peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, atau proses dari satu atau lebih individu (Creswell & Creswell, 2018). Desain ini dipilih untuk memahami secara komprehensif dinamika kolaborasi pembiayaan dalam proses resertifikasi pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Pentingsari.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan data diperoleh dari aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam siklus resertifikasi dan tata kelola kemitraan. Penelitian ini melibatkan lima informan kunci yang mewakili unsur *pentahelix* atau pemangku kepentingan utama, meliputi pengelola inti desa wisata, regulator/pemerintah daerah, mitra swasta/CSR, auditor independen, dan tokoh masyarakat lokal. Rincian profil informan, peran, serta rasionalisasi pemilihannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Kunci Penelitian

KODE INFORMAN	PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	JUSTIFIKASI
INF-1	Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Pelaksana teknis operasional dan manajerial tingkat desa	Memahami secara rinci dinamika administrasi, pemenuhan 174 indikator, serta negosiasi skema *cost-sharing*.
INF-2	Kementerian Pariwisata	Pembina kebijakan dan pembuat regulasi	Memaknai implikasi kebijakan efisiensi anggaran serta peran regulasi Permenparekraf No. 9 Tahun 2021
INF-3	Bakti BCA	Penyedia dana CSR dan pendamping program	Memahami skema pendanaan, mekanisme kontrol, penetapan standar, serta perpanjangan PKS
INF-4	LS-Pr ISTC	Auditor destinasi pariwisata berkelanjutan	Menilai kepatuhan teknis kriteria Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 dan GSTC-D
INF-5	Tokoh Masyarakat	Pendukung dan pemangku kepentingan tingkat lokal	Partisipasi dalam kegiatan resertifikasi

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam mendasar pada panduan wawancara terstruktur serta observasi lapangan langsung terhadap operasional destinasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151 e-ISSN: 2686-2522
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pentingsari dan BCA, laporan evaluasi kinerja bulanan, dokumen hasil asesmen sertifikasi, serta regulasi Permenparekraf No. 9 Tahun 2021.

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengonfirmasi informasi dari pengelola desa kepada pihak Bakti BCA, Kementerian Pariwisata, dan auditor LS-Pr ISTC. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan bukti dokumentatif dan catatan observasi. Selanjutnya, data dianalisis secara tematik melalui tiga tahapan utama: reduksi data (mengodekan dan mengelompokkan transkrip wawancara), penyajian data (menyusun narasi dan pola hubungan skema pembiayaan), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi guna merumuskan model pembiayaan resertifikasi desa wisata yang adaptif.

3. HASIL DAN DISKUSI

Bagian ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan komprehensif mengenai operasionalisasi model pembiayaan resertifikasi berkelanjutan di Desa Wisata Pentingsari. Pemaparan temuan dibagi ke dalam lima aspek utama yaitu profil destinasi, identifikasi kebutuhan pembiayaan resertifikasi, implementasi model kolaborasi CSR, faktor pendukung dan tantangan, serta implikasi teoretis maupun manajerial dari tata kelola tersebut.

3.1. Profil Desa Wisata Pentingsari

Desa Wisata Pentingsari yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, didirikan pada tahun 2008 dengan visi menjadi destinasi berkelanjutan yang memadukan kearifan lokal, alam, dan budaya. Mengusung tema pariwisata berbasis alam dan pertanian, desa ini menawarkan interaksi langsung melalui aktivitas seperti bajak sawah, susur sungai, hingga pengembangan ekonomi kreatif melalui UMKM kopi Merapi dan batik wayang suket. Pendekatan ini merepresentasikan model *Community-Based Ecotourism* yang matang, di mana pemberdayaan masyarakat lokal menjadi motor utama penggerak pariwisata

Keberhasilan tata kelola desa ini terlihat dari pertumbuhan data pengunjung yang signifikan, yakni sebanyak 27.255 wisatawan pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 32.223 pada tahun 2024. Sebagai destinasi yang telah diakui secara internasional, operasionalisasi pariwisata berkelanjutan di Pentingsari tidak sekadar bertumpu pada pemenuhan indikator teknis, melainkan berakar kuat pada kearifan lokal falsafah Jawa *Memayu Hayuning Bawono* (menjaga harmoni, kelestarian, dan keindahan alam semesta). Nilai luhur ini menjadi fondasi utama komunitas dalam menyinergikan setiap bentuk kemitraan strategis dengan upaya pelestarian lingkungan dan budaya setempat (Demolinggo et al., 2020).

Perjalanan formal Pentingsari sebagai destinasi berkelanjutan dimulai saat menerima Sertifikat dan Penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan untuk pertama kalinya pada Maret 2021. Keberhasilan ini kemudian berlanjut pada tahun 2025, di mana Pentingsari berhasil mempertahankan statusnya melalui proses resertifikasi yang didukung secara penuh oleh program CSR Bakti BCA. Dengan merujuk pada kriteria dalam Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021, pencapaian ini menegaskan komitmen desa dalam menjaga standar kualitas pelayanan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat secara konsisten.

3.2. Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan Resertifikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembiayaan resertifikasi Desa Wisata Pentingsari melibatkan Bakti BCA, Kementerian Pariwisata, LS-Pr ISTC, dan pengelola desa wisata. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, Bakti BCA mengajukan permohonan resertifikasi kepada Kementerian Pariwisata, selanjutnya Kementerian Pariwisata menugaskan LS-Pr ISTC untuk melaksanakan asesmen, sementara Desa Wisata Pentingsari mempersiapkan dokumen dan kebutuhan pelaksanaan asesmen. Berdasarkan wawancara dengan informan dari unsur pemerintah (INF-2, wawancara, 6 Mei 2026), ISTC merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sertifikasi pariwisata berkelanjutan dan secara kelembagaan berada dalam ekosistem Kementerian Pariwisata. Hal ini sejalan dengan dokumen Kementerian yang menjelaskan bahwa ISTC dibentuk berdasarkan SK oleh Menteri

JKP
Jurnal Kajian Pariwisata
Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67
e-ISSN: 2686-2522

Pariwisata untuk menjalankan fungsi yang salah satunya adalah untuk melakukan sertifikasi pariwisata berkelanjutan.

Pada tingkat pelaksanaan, pembiayaan dilakukan melalui pembagian komponen biaya antara BCA dan Desa Wisata Pentingsari. Berdasarkan wawancara dengan informan dari unsur pengelola desa wisata (INF-1, wawancara, 28 April 2026), BCA menanggung akomodasi dan biaya tim asesor, sedangkan desa wisata menanggung persiapan kegiatan, kebutuhan selama asesmen, konsumsi, dan suvenir. Sementara itu, pemenuhan bukti dukung dilakukan melalui Jejaring Desa Wisata (Jadesta) dengan mengunggah bukti pemenuhan 174 indikator sesuai Permenparekraf No. 9 Tahun 2021.

Besarnya kebutuhan biaya ini menjadi tantangan struktural bagi desa wisata, yang pada umumnya memiliki kapasitas finansial terbatas dan bergantung pada pendapatan operasional harian. Dalam konteks ini, tuntutan sertifikasi berubah menjadi *financial barrier* yang membatasi kemampuan desa untuk mempertahankan status keberlanjutan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa transisi menuju pariwisata berkelanjutan kerap terhambat oleh beban operasional dan keterbatasan sumber daya finansial di tingkat tapak (Magnusson et al., 2024; Mangion et al., 2025).

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah, yang dalam situasi efisiensi fiskal tidak mampu memfasilitasi proses sertifikasi maupun resertifikasi dalam skala luas. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tuntutan standar keberlanjutan dengan kapasitas pembiayaan lokal, yang menjelaskan mengapa tingkat keberhasilan resertifikasi tanpa intervensi pihak ketiga masih relatif rendah.

3.3. Model Pembiayaan Resertifikasi Berkelanjutan Desa Wisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembiayaan resertifikasi Desa Wisata Pentingsari melibatkan Bakti BCA, Kementerian Pariwisata, LS-Pr ISTC, dan pengelola desa wisata. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, Bakti BCA mengajukan permohonan resertifikasi kepada Kementerian Pariwisata, selanjutnya Kementerian Pariwisata menugaskan LS-Pr ISTC untuk melaksanakan asesmen, sementara Desa Wisata Pentingsari mempersiapkan pemenuhan bukti dukung yang dilakukan melalui Jejaring Desa Wisata (Jadesta), dengan pengunggahan bukti pemenuhan 174 indikator sesuai Permenparekraf No. 9 Tahun 2021.

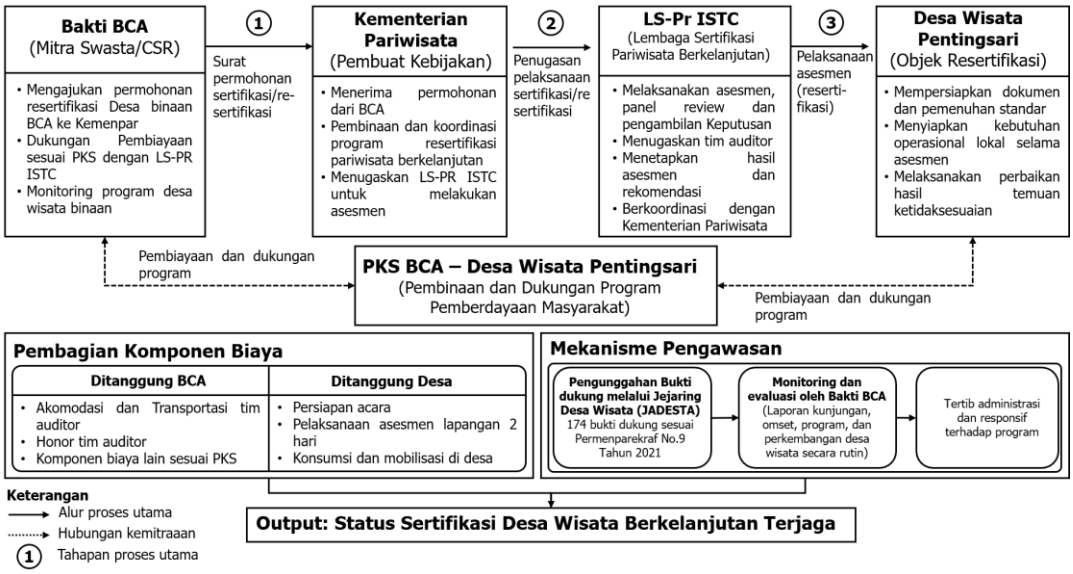

Gambar 1. Model Pembiayaan Resertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Wisata Pentingsari
Sumber: Hasil penelitian, 2026

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan dilakukan melalui pembagian komponen biaya antara BCA dan Desa Wisata Pentingsari. Berdasarkan keterangan informan dari unsur

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151 e-ISSN: 2686-2522
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67

pengelola desa wisata (INF-1, wawancara, 28 April 2026), BCA menanggung akomodasi, transportasi, dan honor tim asesor, sedangkan desa wisata menanggung persiapan kegiatan, kebutuhan selama asesmen, konsumsi, dan suvenir. Dengan demikian, model ini menunjukkan bentuk pembiayaan kolaboratif yang memungkinkan keterbatasan kapasitas finansial desa wisata diatasi melalui dukungan mitra swasta, tanpa menghilangkan tanggung jawab internal desa wisata.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini merepresentasikan bentuk *Multi-Helix Collaboration* yang tidak hanya bersifat transaksional finansial, tetapi juga bertransformasi menjadi kemitraan strategis. Pihak CSR menerapkan mekanisme monitoring, evaluasi kinerja, serta menetapkan standar administrasi yang ketat terhadap desa wisata binaannya, yang secara tidak langsung mendorong digitalisasi dan tata kelola e-administrasi pengelola lokal (Halim et al., 2023). Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai *quasi-governance mechanism* yang berperan aktif dalam menjaga kualitas, akuntabilitas, serta kontinuitas implementasi standar keberlanjutan.

3.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Model

Keberhasilan implementasi model pembiayaan resertifikasi berbasis kolaborasi CSR di Desa Wisata Pentingsari dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pendorong internal-eksternal serta sejumlah tantangan struktural di tingkat tapak. Pemetaan faktor pendukung dan penghambat dalam operasionalisasi tata kelola pembiayaan ini dirangkum secara komprehensif pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

ASPEK	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Finansial dan Pendanaan	Kepastian pembiayaan jangka panjang melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan Bakti BCA yang terjalin sejak 2014.	Tingginya biaya resertifikasi dan keterbatasan alokasi APBN/APBD
Kelembagaan dan SDM	Stabilitas organisasi, kontinuitas kepemimpinan, dan komunikasi pemberdayaan yang efektif di dalam struktur masyarakat desa	Ketimpangan kapasitas kelembagaan dan keterbatasan SDM terampil antar-desa wisata.
Administrasi dan Tata Kelola	Pengelola mampu menyediakan bukti administratif yang terstruktur dan dilaporkan secara berkala sesuai standar Permenparekraf No. 9 Tahun 2021	Prosedur sertifikasi bertingkat yang kompleks dan membutuhkan waktu lama.
Kontrol dan Evaluasi	Mekanisme *monitoring*, kewajiban pelaporan rutin, dan evaluasi tahunan dari pihak CSR berfungsi sebagai sistem kontrol akuntabilitas.	Risiko ketergantungan (*dependency*) yang tinggi terhadap kebijakan korporasi mitra.
Kesadaran Internal	Inisiatif mandiri dari pengelola yang menyadari tingginya nilai sebuah label sertifikasi lingkungan bagi daya saing destinasi	Rendahnya inisiatif dan komitmen mandiri pada desa wisata secara umum.

3.5. Implikasi Teoritis dan Manajerial

Secara teoritis, penelitian ini memperluas diskursus pariwisata berkelanjutan dengan menempatkan pembiayaan resertifikasi sebagai penentu utama kontinuitas sertifikasi GSTC-D di tingkat akar rumput. Temuan ini menggeser pemaknaan CSR dari instrumen filantropi sukarela menjadi *alternative governance mechanism*. Model kolaborasi ini menandai transisi menuju praktik *hybrid governance* dalam pariwisata, di mana tata kelola destinasi tidak lagi didominasi oleh negara, melainkan dirawat secara kolaboratif bersama entitas swasta dan komunitas lokal.

Dari sisi manajerial, keberhasilan resertifikasi terbukti tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana eksternal, melainkan pada kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151 e-ISSN: 2686-2522
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67

tata administrasi dan operasional secara konsisten. Bagi sektor swasta, model ini menawarkan kerangka kemitraan berbasis CSV. Sementara bagi pembuat kebijakan, temuan ini mendesak perumusan regulasi yang secara resmi memfasilitasi dan mengamankan skema kolaborasi pembiayaan lintas sektor guna menanggulangi hambatan fiskal pemerintah dalam menjaga keberlanjutan desa wisata di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sertifikasi desa wisata tidak hanya ditentukan oleh aspek kepatuhan terhadap standar, tetapi sangat bergantung pada kapasitas pembiayaan dan tata kelola kelembagaan. Tingginya biaya resertifikasi, yang mencapai puluhan juta rupiah per desa, menjadikan sertifikasi sebagai hambatan struktural bagi sebagian besar desa wisata untuk mempertahankan status keberlanjutannya secara mandiri.

Dalam konteks tersebut, Desa Wisata Pentingsari menunjukkan model pembiayaan alternatif melalui kolaborasi CSR dengan pembagian komponen biaya (*cost-sharing*). Model ini tidak hanya menyediakan dukungan finansial, tetapi juga menghadirkan mekanisme kontrol melalui monitoring, evaluasi, dan standar administrasi yang ketat. Dengan demikian, CSR dalam penelitian ini tidak lagi berfungsi sebagai instrumen filantropi, melainkan sebagai *alternative governance mechanism* yang berperan dalam menjaga keberlangsungan status tersertifikasi.

Namun demikian, keberhasilan model ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara langsung. Faktor seperti kekuatan kelembagaan desa, komitmen dan semangat pengelola, solidaritas pemangku kepentingan, konsistensi dalam pengelolaan, serta akses terhadap mitra CSR menjadi determinan penting yang membedakan keberhasilan antar destinasi. Komitmen pengelola dan rasa memiliki terhadap pengembangan desa wisata menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan inisiatif, terutama ketika dukungan eksternal dan sumber daya finansial mengalami keterbatasan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan. Pemerintah perlu mendorong pengembangan skema pembiayaan kolaboratif antara sektor publik dan swasta, disertai pengembangan insentif atau subsidi parsial untuk mengurangi hambatan biaya sertifikasi bagi desa wisata. Bagi sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan seperti CSR dapat diarahkan pada kemitraan jangka panjang berbasis *shared value*, yang tidak hanya berfokus pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga mendukung penguatan sistem monitoring, pendampingan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa wisata. Sementara itu, bagi pengelola desa wisata, penguatan kapasitas kelembagaan, sistem administrasi dan dokumentasi, serta konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesiapan dalam memperoleh dan mempertahankan sertifikasi. Keberlanjutan skema tersebut juga memerlukan komitmen dan semangat kolektif pengelola desa wisata agar proses perbaikan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, tetapi berkembang menjadi praktik pengelolaan berkelanjutan yang konsisten dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan kontribusi nyata dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Amelda Pramezwary, Ibu Juliana, dan Ibu Diena Mutiara Lemy atas segala arahan, ilmu, dan masukan berharga yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan kajian mengenai model pembiayaan resertifikasi Desa Wisata Pentingsari. Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pembimbing atas arahan, masukan, dan dukungan akademik selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Kementerian Pariwisata, Lembaga Sertifikasi Produk Indonesia Sustainable Tourism Council (LS-Pr ISTC), pengelola Desa Wisata Pentingsari, serta Bakti BCA atas dukungan dan kerja sama yang memungkinkan pengumpulan data penelitian terlaksana. Penulis turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, dan berkontribusi dalam mendukung penyelesaian penelitian ini.

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151 e-ISSN: 2686-2522
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67

5. REFERENSI

Aji, R. R., & Faniza, V. (2024). Community-Based Ecotourism: A Case Study of Pentingsari Village. *Journal of Architectural Research and Design Studies*, *8*(1). https://doi.org/10.20885/jars.vol8.iss1.art8

Amanda, T. E., & Agfianto, T. (2021). the Corporate Social Responsibility (CSR) Model of Pt Indana in Jodipan Tourism Village Kampung Warna Warni". *Jurnal Pengembangan Kota*, *9* (1), 26–35. https://doi.org/10.14710/jpk.9.1.26-35

Buffa, F., Martini, U., Masotti, P., & De Santis, D. (2025). GSTC certification and local communities. Evidence from the perspective of successful first mover DMOs. *Journal of Destination Marketing and Management*, *38* (June). https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2025.101034

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Research Design* (Vol. 4, Number June). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAJ

Demolinggo, R. H., Damanik, D., Wiweka, K., & Adnyana, P. P. (2020). Sustainable Tourist Villages Management Based on Javanese Local Wisdom 'Memayu Hayuning Bawono.' *International Journal of Tourism & Hospitality Review*, *7*(2), 41–53.

Dias, F., Lavaredas, A. M., & Esteves, P. (2024). What Is the Value of an Environmental Certification Label in Tourism Industry? Is It Worth the Effort? *Sustainability (Switzerland)*, *16*(19). https://doi.org/10.3390/su16198587

Elhoushy, S., Elzek, Y., & Font, X. (2025). Sustainable tourism certification: a systematic literature review and suggested ways forward. *Journal of Sustainable Tourism*. https://doi.org/10.1080/09669582.2025.2487674

Fitriana, A. N., Wijaya, A. F., Wanto, A. H., & Anantanatorn, A. (2025). Multi Helix Collaboration Model as A Policy Instrument of Tourism Village Policy in Pujon Kidul Tourism Village. *Journal of Local Government Issues*, *8*(2), 196–214. https://doi.org/10.22219/logos.v8i2.38605

Habibie. (2021). Pelatihan dan Penyuluhan Sertifikasi Desa Wisata di Desa Cibuntu. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, *3*(2), 78–83. https://doi.org/10.30647/jpp.v30647/jpp.v3i2.1599

Halim, D. K., Pramesti, D. S., & Permatasari, D. N. C. (2023). E-administration for collaborative governance body of green tourism villages in realizing smart villages in Bali. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1263*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1263/1/012017

Hendrayani, Y., Zen, I. S., Uljanatunnisa, & Maryam, S. (2025). Nglanggeran Village: A Model for Sustainable Tourism Through Multi-Stakeholder Engagement and Corporate Social Responsibility. *SAGE Open*, *15*(3), 1–16. https://doi.org/10.1177/21582440251363672

Jaelani, A., & Hanim, T. F. (2021). Teknologi Digital, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Desa Wisata Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *6*(2), 237. https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9613

Jejaring Desa Wisata. (2025). *Dashboard Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan*. Kemenparekraf.Go.Id. https://sertidewi.jadesta.kemenparekraf.go.id/

Kementerian Pariwisata. (2025, December 17). Menpar apresiasi 10 desa peraih sertifikasi desa wisata berkelanjutan 2025. *Kementerian Pariwisata*. https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-menpar-apresiasi-10-desa-peraih-sertifikasi-desa-wisata-berkelanjutan-2025

Lemy, D. M., Pramono, R., & Juliana. (2022). Acceleration of Environmental Sustainability in Tourism Village. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *17*(4), 1273–1283. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170425

Magnusson, T., Karabag, S. F., Wigger, K., & Andersson, G. (2024). Sustainability transitions in tourism: on the transformation of a fragmented sector. *Tourism Geographies*, *26*(2), 157–172. https://doi.org/10.1080/14616688.2023.2291700

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 8 No.2 | September 2026: 142-151 e-ISSN: 2686-2522
DOI: doi.org/10.51977/crjy0h67

Mangion, M. L., Schembri, J., Pranić, L., & Najev Čačija, L. (2025). Why is the transition to sustainable tourism challenging for Mediterranean coastal destinations? *Current Issues in Tourism*, *3500*. https://doi.org/10.1080/13683500.2025.2582782

Meliana, M., Geusan Akbar, G., & Kania, I. (2025). Multi-Stakeholder Collaboration in the Development of Tourism Villages in Garut Regency: Collaborative Governance Approach. *Jurnal Toursci*, *2*(4), 319–331. https://doi.org/10.62885/toursci.v2i4.743

Octaviani, L. K., Sugiarto, Hendratono, T., & Susanto, D. R. (2026). From Collaboration To Resilience: Modeling the Mediating Role of Sustainable Tourism Management in Community-Based Tourism Systems. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, *3*(1), 584–598. https://doi.org/10.62567/micjo.v3i1.1661

Pugra, I. W., Oka, I. M. D., & Suparta, I. K. (2021). Kolaborasi Pentahelix Untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green Tourism. *Bhakti Persada*, *7*(2), 111–120. https://doi.org/10.31940/bp.v7i2.111-120

Risfandini, A. (2024). Sustainable Tourism Implementation In Indonesia: Emphasizing Green Tourism, Community-Based Tourism, and Local Empowerment. *Barista : Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, *11*(01), 58–67. https://doi.org/10.34013/barista.v11i01.1506

Sumarna, E., Geohansa, A., Kania, I., Akbar, G. G., & Ulumudin, A. (2025). The Penta Helix Model in Tourism Village Development: A Case Study of Samida, Garut Regency. *Ilomata International Journal of Social Science*, *6*(2), 748–761. https://doi.org/10.61194/ijss.v6i2.1683

Teguh, F. X., Amelda Pramezwary, Diena Mutiara Lemy, & Julia Dewi. (2025). Integrative Governance Model For Sustainable Rural Tourism Planning: The Case Of Tanjung Boleng Village, Indonesia. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia*, *19*(2), 283–308. https://doi.org/10.47608/jki.v19i22025.283-308

Triwibiansyah, J. F., & Bayangkara, I. B. K. (2025). Sinergi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra International Tbk Dalam Keberlanjutan Lingkungan Melalui Program Astra Green Company Khususnya Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *5*(2), 205–212. https://doi.org/10.51903/jupea.v5i2.3962